



**DAMPAK PENGHENTIAN PERKARA TERHADAP TERSANGKA
MELALUI PRAPERADILAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

TESIS

SUYADI

1810622101

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTASHUKUM**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2021



**DAMPAK PENGHENTIAN PERKARA TERHADAP TERSANGKA
MELALUI PRAPERADILAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN**

TESIS

**SUYADI
1810622101**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Suyadi

NRP 1810622101

Tanggal : 17 Juli 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 17 Juli 2021

Yang Menyatakan,



SUYADI

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyadi

NRP 1810622101

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas *Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul: **DAMPAK PENGHENTIAN PERKARA TERHADAP TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

Yang Menyatakan



SUYADI

PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Suyadi

NRP 1810622101

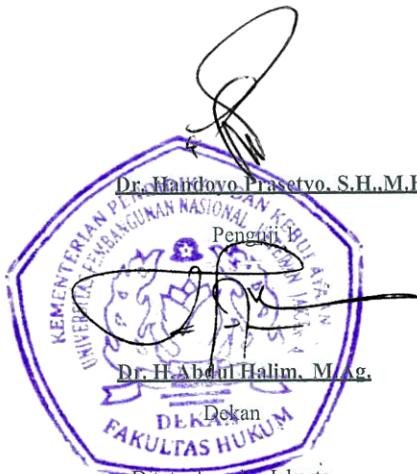
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : **DAMPAK PENGHENTIAN PERKARA TERHADAP
TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN**

Telah berhasil dipertahankan dihadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang di perlukan untuk memperoleh gelar magister hukum pada program studi ilmu hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta .



Dr. Abdul Halim, S.H., M.H.
Ketua Penguji



Dr. Haidoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Penguji

Dr. H. Abdul Halim, M. Ag.

Dekan

Ditotapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian :



Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Penguji 2



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., M.H.

Kaprodi

**DAMPAK PENGHENTIAN PERKARA TERHADAP TERSANGKA
MELALUI PRAPERADILAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN**

Oleh:

Suyadi

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Negeri
Jakarta

Abstrak

Terdapat berbagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Diterbitkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP maka terbentuklah Praperadilan yang bertugas menjaga ketertiban pemeriksaan dan melindungi tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji secara normatif lembaga Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan untuk penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka serta untuk mengetahui pertimbangan yuridis sebagai dasar permohonan perkara kewenangan Praperadilan terhadap permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh tersangka. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Diperoleh kesimpulan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan serta Berdasarkan Pasal 50 KUHAP dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 KUHAP dan Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa supaya nasibnya tidak terkatung-katung dan mendapat kepastian hukum.

Kata Kunci: Penghentian Perkara, Tersangka, Penyidikan, Praperadilan

**THE IMPACT OF TERMINATION OF CASE ON THE SUSPECTIVE
THROUGH PRE-TRIAL IN THE PROCESS OF INVESTIGATION OF TAX
CRIMINAL ACTIONS**

By:

Suyadi

Master of Law Program, Faculty of Law, Jakarta State Veterans University

Abstract

There are various criminal acts or criminal acts or tax violations that can be subject to criminal sanctions. With the publication of the Criminal Procedure Code, abbreviated as KUHAP, a pretrial is formed which is tasked with maintaining order in the investigation and protecting the suspect against the actions of investigators and public prosecutors that violate the law and harm the suspect. The purpose of this research is to find out and normatively review the pre-trial institution having the authority to examine and adjudicate the application to terminate the investigation submitted by the suspect and to find out juridical considerations as the basis for the petition for the pretrial authority case against the request for termination of investigation submitted by the suspect. This research is a normative juridical research. The conclusion is obtained that pretrial is the authority of the district court to examine and decide according to the method regulated in this law, regarding whether an arrest is legal or not and / or at the request of the suspect or his family or other party on the power of the suspect, whether or not the termination of investigation or prosecution is legal. on requests for the sake of upholding law and justice and based on Article 50 of the Criminal Procedure Code and Article 4 paragraph (2) of Law No 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article 50 of the Criminal Procedure Code and Article 4 paragraph (2) concerning Judicial Power give the suspect or defendant the right to his fate is not in limbo and has legal certainty.

Keywords: *Termination of Cases, Suspects, Investigation, Pre-trial*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“DAMPAK PENGHENTIAN PERKARA TERHADAP TERSANGKA MELALUI PRAPERADILAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN”**

Selama menyusun tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr.Bambang Waluyo ,S.H.,MH selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan saran dan bimbingan yang bermanfaat.
2. Dr. Beniharmoni Harefa,S.H,LLM sebagai Kaprodi yang telah memberikan arahan yang bermanfaat.
3. Ibu Yuli sebagai akademik yang sudah banyak membantu disaat perkuliahan.
4. Bapak Satino,S.E,M.M yang sudah banyak membantu selama perkuliahan.
5. Kepada semua teman teman saya banyak mengucapkan terimakasih.

Akhirnya saya sebagai penulis berharap kiranya tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu khususnya hukum pidana Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini belum sempurna, oleh karena itu penulis senantiasa mengharap kritik dan saran yang membangun, semoga tesis ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 17 Juli 2021

Suyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Penghentian Perkara Pajak Penyidikan Tindak Pidana.....	20
B. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	39
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Pengertian Penelitian Hukum.....	61
B. Jenis-Jenis Penelitian Hukum	61
C. Pendekatan Penelitian.....	62
D. Metode Pengumpulan Data	63
E. Metode Analisis.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN	66
A. Ketetapan Praperadilan Dengan Mengacu Pada Pasal 77 KUHAP Tentang Sah Atau Tidaknya Penghentian Perkara Pidana	66
B. Penanganan Kasus Penghentian Perkara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103